**PENYELESAIAN CERAI GUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

Muhammad Azani

Email: mhd.azani@unilak.ac.id

Hasan Basri

Email: hasan.basri@unilak.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Abstrak

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang menghendaki perceraian. Gugatan perceraian yang terjadi adalah adanya pernikahan yang pernah dilaksanakan hanya beberapa bulan, setelah itu pihak istri mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. Tujuan penelitian untuk menganalisis penyelesaian cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dipadukan dengan data kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, penyelesaian cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak baik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI. Penyelesaian cerai gugat bagi masyarakat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. Kedua, cerai gugat pernikahan atas kehendak orang tua di Kecamatan Tualang Kepada PA Bengkalis karena kedua belah pihak merasa bahwa sejak awal mereka sama-sama tidak ada kecocokan, meskipun salah satu pihak masih tidak ingin bercerai dengan pasangannya.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam

Abstract

Divorce is a divorce filed by the wife who wants a divorce. Divorce lawsuit that occurred was the existence of a marriage that had been held for only a few months, after which the wife filed a petition for divorce in the Religious Court of Bengkalis. The purpose of the research is to analyze the settlement of a claim for divorce based on Law of Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law in Tualang District, Siak Regency. The research method uses sociological legal research with data collection techniques through interviews combined with library data. The results of the study stated that first, the settlement of the claim for divorce can only be done before a court hearing after the court has not succeeded in reconciling the two parties either regulated by Law of Number 1 of 1974 or Compilation of Islamic Law. The settlement of the claim for divorce for the people of Tualang District, Siak Regency is in the Religious Court (PA) of Bengkalis. Second, the marriage claim divorce on the will of parents in the Tualang Subdistrict To Religious Court of Bengkalis because both parties felt that

from the beginning they had no match, even though one party still did not want to divorce their partner.

Keywords: *Divorce, Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law*

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan aturan hukum ikatan perkawinan yang berlaku bagi warga beragama dan masyarakat di Indonesia, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukan bagi yang beragama Islam. Pada kedua aturan tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dalam KHI lebih ditekankan lagi bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan

*sakinah, mawaddah, dan warahmah*² tidak selamanya berakhir dengan baik. Terdapat beberapa kasus yang mengalami perceraian, yaitu putusnya suatu hubungan suami dan istri karena tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Perceraian dilakukan oleh setiap pasangan suami dan istri, karena adanya perselisihan antara suami dan istri.

Berdasarkan data perceraian di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam 2 (dua) tahun terakhir terjadi peningkatan kasus perceraian ke Pengadilan Agama (PA) Bengkalis.³ Data cerai gugat dan cerai talak dari Kecamatan Tualang pada tahun 2016 adalah cerai gugat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) gugatan dan cerai talak sebanyak 30 (tiga puluh) gugatan.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³ Penulis harus menegaskan bahwa Pengadilan Agama (PA) Bengkalis masih membawahi sidang-sidang di Kabupaten Siak, sehingga masyarakat di Kecamatan Tualang yang mengajukan gugatan perceraian berada di bawah PA Bengkalis. Kabupaten Siak hanya tempat bersidang bagi PA Bengkalis setiap hari Kamis bila ada perkara yang disidangkan.

¹ Akad tersebut memiliki makna bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", *Mimbar Hukum*, No. 52 Th XII Mei-Juni, 2001, hlm. 112.

Pada tahun 2017, kasus cerai gugat sebanyak 41 (empat puluh satu) gugatan, sedangkan cerai talak sebanyak 32 (tiga puluh dua) gugatan.⁴

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang menghendaki perceraian. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin”.⁵ Pada Pasal 132 ayat (2) KHI menyatakan “Gugatan perceraian ini dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak ingin kembali ke rumah

kediaman bersama”.

Gugatan perceraian yang terjadi adalah adanya pernikahan yang pernah dilaksanakan hanya beberapa bulan, setelah itu pihak istri mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. Alasan cerai gugat karena istri merasa sudah tidak cocok lagi, tetapi orang tua pihak istri masih mendukung agar pernikahan tetap dipertahankan.⁶ Di sisi lain, terdapat beberapa kasus cerai gugat yang tidak diajukan ke Pengadilan Agama (PA) karena merasa dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menganalisis cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

⁴ Data sekunder yang diperoleh di PA Bengkalis.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) kepada hakim, sehingga posisi perempuan tidak semena-mena yang ditalak oleh suami. Baik suami atau istri sama-sama memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian kepada hakim dengan alasan yang dibenarkan menurut kedua aturan di atas. Moh. Afandi, “Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW”, *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2, 2014, hlm. 200.

⁶Pengakuan pelaku cerai gugat di Kecamatan Tualang pada Pengadilan Agama (PA) Bengkalis pada Tahun 2017.

Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?

2. Apakah alasan cerai gugat pernikahan atas kehendak orang tua di Kecamatan Tualang Kepada Pengadilan Agama (PA) Bengkalis?
3. Bagaimanakah putusan hakim terhadap pengajuan cerai gugat di kecamatan tualang kepada Pengadilan Agama (PA) Bengkalis?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas berlakunya hukum positif tentang cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Alasan dipilihnya lokasi ini karena berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama (PA) Bengkalis menunjukkan bahwa cerai gugat di Kecamatan Tualang termasuk tinggi dibandingkan kecamatan lain.

Subjek penelitian adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Ketua Panitera Pengadilan Agama (PA) Bengkalis, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tokoh masyarakat di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan pelaku cerai gugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (PA) Bengkalis maupun yang tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (PA). Dalam penetapan sampel atas subjek penelitian tersebut digunakan metode *purposive* dan *snowball*.⁷ Objek penelitian ini adalah cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

⁷ Metode *Purposive* dalam penelitian ini untuk menentukan sampel yang dipilih secara acak terhadap responden pada pelaku cerai gugat, sedangkan Metode *Snowball* dalam penelitian ini adalah menggunakan sejumlah kasus gugatan cerai gugat melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang lain, kemudian mencari hubungan melalui proses yang sama. Nina Nurdiani, "Teknik Sampling *Snowball* dalam Penelitian Lapangan", *Comtech*, Vol. 5. No. 2, Desember 2014, hlm. 1113.

Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden dengan wawancara, data sekunder adalah data yang berasal dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian, dan data tertier adalah data yang bersumber dari ensiklopedi dan kamus hukum yang mendukung data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Observasi dengan melakukan pengamatan terhadap cerai gugat di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Wawancara yang digunakan adalah wawancara secara struktural dengan menggunakan daftar pertanyaan. Responden yang diwawancarai dapat menjawab pertanyaan secara langsung pada saat tanya jawab melalui tatap muka, responden dapat juga menuliskan jawaban pada lembar yang disediakan dengan menandatangani pada kolom nama responden sebagai bukti bahwa responden yang bersangkutan telah diwawancarai. Responden yang tidak

dapat diwawancarai secara langsung diwawancarai dengan telepon atau mengirimkan jawaban dengan menggunakan e-mail. Kajian pustaka dilakukan untuk mengkaji berbagai referensi tentang cerai gugat yang terdapat pada buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan menarik kesimpulan menggunakan metode induktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan melakukan pemilahan data-data dari wawancara dan dihubungkan dengan hasil kajian pustaka untuk mencari solusi atas permasalahan. Hasil analisis dapat berbeda dengan analisis yang telah ada sebelumnya karena data-data perbedaan penafsiran data dalam analisis data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyelesaian Kasus Cerai Gugat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena 1) kematian, 2) perceraian, dan 3) atas keputusan pengadilan. Masyarakat di Kecamatan Tualang memahami bahwa perceraian harus melalui pengadilan, sedangkan sebagian yang lain menyatakan bahwa mereka cukup bercerai di luar pengadilan.⁸ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan pada ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih tegas menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116 KHI menyatakan tentang perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang

⁸ Hasil wawancara dengan Farida Hanim, Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang pada 10 April 2018 di Kantor KUA Kota Perawang.

lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data di PA Bengkalis menyatakan bahwa perceraian dalam konteks cerai gugat semakin tinggi dalam 2 (dua) tahun terakhir. Perbandingan cerai gugat dan cerai talak di Kecamatan Tualang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
2016	37	30	67
2017	41	32	73
	78	62	140

Data cerai gugat pada tahun 2016 berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) gugatan, sedangkan pada 2017 cerai gugat berjumlah 41 (empat puluh satu) gugatan. Jumlah cerai gugat dalam 2 (dua) tahun adalah 78 (tujuh puluh delapan) gugatan. Cerai talak pada 2016 berjumlah 30 (tiga puluh) gugatan, sedangkan pada 2017 sebanyak 32 (tiga puluh dua) gugatan. Jumlah cerai talak dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah 62 (enam puluh dua) gugatan. Cerai gugat dan cerai talak sama-sama mengalami peningkatan gugatan pada 2016 dan 2017, sehingga jumlah keseluruhan adalah 140 (seratus empat puluh) gugatan.⁹

Temuan penelitian Fachrina dan Rinaldi Eka Putra menyatakan bahwa ketidakcocokan prinsip dan perilaku dapat mengakibatkan

⁹ Data olahan dari hasil wawancara dengan Zulkifli, Ketua Panitera Pengadilan Agama (PA) Bengkalis di Bengkalis pada 15 Mei 2018.

ketidakstabilan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseluruhan informan menyatakan adanya berbagai masalah perkawinan merupakan faktor penyebab mereka mengajukan perceraian.¹⁰ Beberapa permasalahan yang sering muncul adalah kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, dan pernikahan atas bukan kehendak sendiri.¹¹

Seorang responden menyatakan bahwa permasalahan ekonomi dan ketidakharmonisan menjadi faktor dominan sebagai penyebab terjadinya perceraian.¹² Pada saat yang sama, mediasi belum berfungsi secara optimal, baik karena kurang kooperatif pihak yang mengajukan perceraian maupun berbagai pihak yang berkecimpung

di dalamnya.¹³ Keberadaan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Tualang belum berfungsi secara optimal. Selain itu, pergeseran budaya di masyarakat Kecamatan Tualang lebih memilih mengurus langsung ke pengadilan dan mengabaikan mediasi di tingkat BP4 kecamatan.¹⁴

Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang menyatakan bahwa pergeseran makna atas konsep keluarga yang ada di lingkungan masyarakat. Status perkawinan yang dinilai sebagai sebuah ikatan yang sakral dan penuh

¹⁰ Fachrina dan Rinaldi Eka Putra, "Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat", *Antropologi Indonesia*, Vol. 34 No. 2, 2013, hlm. 101.

¹¹ Sudifirman L, "Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrab: Polemik dan Isu Gender dalam Kasus Perceraian di PA Sidrab", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 2, Juli 2013, hlm. 194.

¹² Hasil wawancara dengan Farida Hanim, Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang pada 10 April 2018 di Kantor KUA Kota Perawang.

¹³ Angga Marzuki, "Fenomena Perceraian dan Penyebabnya: Studi Kasus Kota Cilegon", *Jurnal Bimas Islam*, Vol.9. No. IV 2016, hlm. 686.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Farida Hanim, Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang pada 10 April 2018 di Kantor KUA Kota Perawang. Terkait dengan peran BP4, tulisan Yenni Sri Utami dan Siti Fatonah menjelaskan bahwa strategi Komunikasi yang dilakukan BP4 di KUA di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta dalam melaksanakan peran dan fungsinya tidak dapat dijalankan secara optimal karena konselor BP4 dalam mediasi dan mencegah terjadinya perceraian bukan orang yang berkompeten di bidangnya. Optimalisasi program kerja ini, maka peran BP4 akan dapat dilakukan secara optimal sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Lihat Yenni Sri Utami dan Siti Fatonah, "Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)", *Channel*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, hlm. 89-99.

dengan sifat keridhaan, saat ini sedikit demi sedikit berubah menjadi satu ikatan yang pragmatis dan profan. Simbol kewibawaan dan kesakralan yang melekat pada lembaga perkawinan secara bertahap semakin memudar,¹⁵ karena semakin mudarnya fungsi-fungsi struktural yang dapat menaungi lembaga perkawinan, seperti kehadiran pemuka-pemuka agama atau lembaga-lembaga adat.¹⁶

2. Cerai Gugat Akibat Pernikahan Atas Kehendak Orang Tua di Kecamatan Tualang Kepada Pengadilan Agama (PA) Bengkalis

Kehidupan rumah tangga harus dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.¹⁷ Dalam hukum Islam terdapat prinsip hukum

yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan.¹⁸ Tujuan perkawinan dalam KHI adalah agar laki-laki dan wanita dapat saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*).¹⁹

Dalam praktiknya, terdapat pernikahan atas kehendak orang tua yang menjodohkan anak-anak mereka tanpa menanyakan persetujuan anak ingin menikah atau tidak. Perjudohan dapat terjadi karena kepemilikan harta agar harta ini tidak jatuh ke tangan orang lain atau calon menantu memiliki harta yang dapat dibanggakan di hadapan kerabat.²⁰

Cerai gugat karena pernikahan atas kehendak orang tua di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis bahwa pernikahan tersebut terjadi karena teman-teman tergugat sudah menikah semua. Orang tua tergugat

¹⁵ Hasil wawancara dengan Zulkarnain Rasul, Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang pada 10 April 2018 di Kantor KUA Kota Perawang.

¹⁶ Syafaat Muhammad, "Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan: Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga", *Jurnal Bimas Islam*, Vol.9. No. IV 2016, hlm. 600.

¹⁷ Ahmad Azahar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

¹⁸ Kamal, Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 18.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁰ Hasil wawancara dengan Responden 1 di Kota Perawang, pelaku cerai gugat pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 15 Maret 2018.

merasa bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tua.²¹ Pola pernikahan ini dapat memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Pernikahan dengan kehendak orang tua dapat berakibat keharmonisan dan keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.²² Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai, sedangkan Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa perkawinan harus dengan persetujuan calon mempelai. Dalam konteks ini, calon pasangan pengantin harus saling mencintai atau saling menerima, dan tidak terpaksa melakukan perkawinan, sehingga kehendak orang tua tidak dapat dijadikan alasan untuk melangsungkan pernikahan.

Cerai gugat dengan alasan pernikahan dengan kehendak orang

²¹ Hasil wawancara dengan Zulkifli, Ketua Panitera Pengadilan Agama Bengkalis di Bengkalis pada 15 Mei 2018.

²² Hasil wawancara dengan Responden 1 di Kota Perawang, pelaku cerai gugat pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 15 Maret 2018.

tua di PA Bengkalis adalah tidak adanya saling mencintai pada pasangan. Pernikahan terjadi karena rasa hormat kepada orang tua yang telah menjodohkan sejak lama, sehingga pernikahan tidak dapat dijalankan sebagaimana layaknya suami istri.²³ Seorang responden menyatakan:

“Sebagai rasa hormat terhadap orang tua terkadang seorang anak yang telah dibesarkan oleh orang tua memiliki rasa patuh kepada orang tua, sehingga membuat anak seolah-olah harus mengikuti semua keinginan orang tua yang telah mendidik dari kecil hingga dewasa, termasuk keinginan untuk menikahkan anak. Padahal anak juga mempunyai pilihan untuk menentukan jodohnya sendiri”.²⁴

Pernikahan untuk memenuhi kewajiban anak terhadap orang tua

²³ Hasil wawancara dengan Responden 2 di Kota Perawang, pelaku cerai gugat pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 17 Maret 2018.

²⁴ Hasil wawancara dengan Responden 1 di Kota Perawang, pelaku cerai gugat pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 15 Maret 2018.

dan tidak adanya saling cinta meskipun penggugat sudah berulang kali menolak untuk dinikahkan dengan tergugat. Pada waktu di rumah orang tua penggugat, penggugat dan tergugat tidur secara terpisah, namun ketika di rumah orang tua tergugat tidur satu kamar, tapi penggugat mengancam tergugat, jika tergugat mengauli penggugat, penggugat akan menjerit sehingga tergugat tidak dapat berbuat apa-apa.²⁵

Selain tidak adanya rasa saling mencintai, yang terjadi juga karena tidak ada komunikasi antara keduanya. Keduanya atau salah satunya tidak menerima perjodohan, sehingga yang terjadi adalah saling menyalahkan antara keduanya ketika ingin melakukan hubungan layaknya suami istri. Istri tidak mau melakukan karena tidak mencintai, sedangkan suami menganggap bahwa dia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan hubungan suami istri sehingga yang terjadi

adalah ancaman ketika hubungan suami istri itu dilakukan.²⁶

Seorang responden menuturkan bahwa tidak ada komunikasi yang baik karena tidak saling mengenal pasangan dengan baik. Bahkan penuturan responden tanpa ada komunikasi memaksa keduanya harus berpisah, sehingga keduanya sulit disatukan kembali sesuai dengan tujuan pernikahan dalam undang-undang perkawinan dan KHI. Tidak ada komunikasi yang baik dimulai sejak 16 Maret 2016 (Minggu pertama dalam pernikahan) penggugat diantarkan oleh tergugat diserahkan kepada orang tua penggugat. Selama itu pula penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi, hingga sekarang telah berpisah selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan.²⁷

Suami atau istri tidak ingin permasalahan rumah tangga berlarut-larut, sehingga mengambil suatu keputusan dengan mengajukan

²⁵ Hasil wawancara dengan Responden 2 di Kota Perawang, pelaku cerai gugat pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 17 Maret 2018.

²⁶ Hasil wawancara dengan Responden 2 di Kota Perawang, pelaku cerai gugat pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 17 Maret 2018.

²⁷ Hasil wawancara dengan Responden 1 di Kota Perawang, pelaku cerai gugat pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 15 Maret 2017.

gugatan cerai. Orang tua masing-masing sebetulnya harus ikut bertanggung jawab karena pernikahan terjadi karena kehendak orang tua.²⁸ Perselisihan antara kedua pihak karena tidak didasarkan cinta tetapi keinginan orang tua yang mengganggu eksistensi pernikahan. Padahal hakikat pernikahan adalah penyatuan kedua belah antara laki-laki dan wanita yang didasari oleh cinta.²⁹ Tujuannya pernikahan untuk melangsungkan keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak agar bahagia lahir dan batin.³⁰

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan kedua calon mempelai, sedangkan dalam KHI diatur pada Pasal 17 ayat (1) berbunyi sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah

menanyakan terlebih dahulu persetujuan kedua calon mempelai dihadapkan dua orang saksi. Ayat (2) berbunyi bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

3. Putusan Hakim Terhadap Pengajuan Cerai Gugat di Kecamatan Tualang Kepada Pengadilan Agama (PA) Bengkalis

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 tentang perkawinan, Mahkamah Agung memberikan himbauan kepada para hakim (baik di lingkungan Peradilan Umum maupun di lingkungan Peradilan Agama) tentang keharusan suatu putusan agar mencantumkan pertimbangan atau alasan secara tepat sebagaimana adanya Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.³¹ Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan yang tidak memberikan pertimbangan serta alasan secara tepat dapat

²⁸ Hasil wawancara dengan Irismawati, Staff Panitera Pengadilan Agama Bengkalis di Bengkalis pada 15 Mei 2018.

²⁹ Hasil wawancara dengan Responden 2 di Kota Perawang, pelaku cerai gugat pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 17 Maret 2018.

³⁰ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: Mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

³¹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan.

Putusan PA Bengkalis tentang cerai gugat pernikahan atas kehendak orang tua di dalamnya memuat pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara menggunakan pertimbangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alasan yang dijadikan pertimbangan suatu putusan adalah memuat pertimbangan hakim yang merupakan alasan pemutus perkara, yang ditimbang secara kronologis, korelasi terhadap segala macam dalil atau keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak, kesaksian para saksi, serta alat bukti. Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan atas kehendak orang tua sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali.

Penggunaan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas dapat dibenarkan, sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri dilatarbelakangi oleh rasa

keterpaksaan. Pihak yang dibebani biaya perkara oleh PA Bengkalis berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan “ Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon.”³² Penggunaan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini cukup beralasan karena perkara permohonan cerai gugat ini merupakan salah satu dari perkara dalam bidang perkawinan.³³

Putusan cerai gugat harus memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, suami atau istri mempunyai kebiasaan yang bertentangan dengan agama.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar

³² Hasil wawancara dengan Irismawati, Staff Panitera Pengadilan Agama Bengkalis di Bengkalis pada 15 Mei 2018.

³³ Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

kemampuannya. Suami atau iste'i pergi tanpa izin dan tanpa memberikan alasan serta tidak memberi kabar selama kepergiannya itu.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Suami atau istri itu dipenjara 5 (lima) tahun atau mendapat hukuman yang sangat berat.
- 4) Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Suami atau istri sering melakukan kekerasan secara fisik yang dapat mengganggu ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Suami atau istri mempunyai kelainan dalam melakukan hubungan suami istri atau memiliki penyakit yang parah dan sulit disembuhkan sehingga

kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan.

- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim itu telah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Hanya saja seharusnya majelis hakim harus mempertimbangkan Pasal 17 Ayat (1), (2), dan (3) KHI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak mengatur perceraian tentang pernikahan atas kehendak orang tua, seharusnya tidak boleh diputuskan karena pernikahan tersebut lebih tepat dalam ranah pembatalan perkawinan. Majelis Hakim seharusnya menggunakan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan yang dipaksakan dapat dibatalkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan, penelitian ini dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian cerai gugat berdasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan pada ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, sedangkan Pasal 115 menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, penyelesaian cerai gugat bagi masyarakat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis.
2. Cerai gugat pernikahan atas kehendak orang tua di Kecamatan Tualang Kepada PA Bengkalis karena kedua belah pihak merasa bahwa sejak awal mereka sama-sama tidak ada kecocokan, meskipun salah satu pihak masih tidak ingin bercerai dengan pasangannya. Penyebab terjadinya pernikahan adalah kehendak orang tua untuk saling menjodohkan anak-anak mereka. Perjodohan ini terjadi karena kepemilikan harta, sehingga harta tetap dikuasai oleh keluarga atau karena orang tua menganggap calon menantu memiliki harta yang dapat dibanggakan. Pernikahan pola ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
3. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim itu telah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Hanya saja seharusnya Majelis Hakim harus memper-timbangan

Pasal 17 Ayat (1), (2), dan (3) KHI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak mengatur perceraian tentang pernikahan atas kehendak orang tua, seharusnya tidak boleh diputuskan karena pernikahan tersebut lebih tepat dalam ranah pembatalan perkawinan. Majelis Hakim seharusnya menggunakan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan yang dipaksakan dapat dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Basyir, Ahmad Azahar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, 1999, Yogyakarta.

Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.

B. Jurnal

Afandi, Moh., "Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW", *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2, 2014.

Fachrina dan Rinaldi Eka Putra, "Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam

Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat", *Antropologi Indonesia*, Vol. 34, No. 2, 2013.

Khumas, Asniar, "Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan", *Jurnal Psikologi*, Vol. 42, No. 3, Desember 2015.

Manan, Abdul, "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", *Mimbar Hukum*, No. 52 Th XII Mei-Juni, 2001.

Marzuki, Angga, "Fenomena Perceraian dan Penyebabnya: Studi Kasus Kota Cilegon", *Jurnal Bimas Islam*, Vol.9. No. IV, 2016.

Muhammad, Syafaat, "Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan: Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9, No. IV, 2016.

Nurdiani, Nina, "Teknik Sampling *Snowball* Dalam Penelitian Lapangan", *Comtech*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

Sudifrman L, "Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrab: Polemik dan Isu Gender dalam Kasus Perceraian di PA Sidrab", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 2, Juli 2013.

Utami, Yenni Sri dan Siti Fatonah, "Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam

Mencegah Perceraian (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)”, *Channel*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 tentang Perkawinan.